

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



36 Inspektorat Se-Jateng Hadiri Rakor di BPK Jateng

Semarang, Senin (26 Oktober 2015) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II T.A. 2015 dan Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah T.A. 2016 yang dihadiri seluruh Inspektorat Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Rapat Koordinasi ini diselenggarakan dengan salah satu tujuannya memperkuat kemitraan antara BPK dengan Inspektorat Pemerintah Daerah. Acara tersebut dimulai pukul 08.30 bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dengan diawali sambutan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I Provinsi Jawa Tengah, **Drs. Suharsono, M.Si.**

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, **Hery Subowo, S.E., MPM., Ak., CIA., CFE.** menyampaikan pentingnya peningkatan kemitraan antara dua instansi yaitu BPK dan Inspektorat. Dalam kemitraan dua instansi ini dilandasi dengan kerangka legislasi dan konstitusi, objektivitas, independensi, kompetensi, pengalaman, serta kinerja berdasarkan standar pemeriksaan. Diharapkan juga antara BPK dan Inspektorat terjalin sinergi dalam pemeriksaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas dari auditor eksternal dan internal.

Dalam Kesempatan ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga menyampaikan fokus pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang menjadi rencana di tahun 2016 pada 9 hal yaitu:

1. Pembangunan desa dan kawasan pedesaan;
2. Peningkatan pelaksanaan Sistem jaminan Sosial Nasional (SJSN);
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Respon isu lokal yang mendapat perhatian signifikan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
5. Persiapan pemda memitigasi bencana yang berulang kali terjadi dan berdampak pada keselamatan publik;
6. Penguatan konektivitas laut-pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut;
7. Pelaksanaan reformasi keuangan negara dalam hal pengelolaan dan pembiayaan utang;
8. Pengamanan produksi pangan;
9. Penguatan data dan informasi pembangunan kependudukan.

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Dalam rapat koordinasi ini pula, BPK menyampaikan bahwa Inspektorat di daerah harus siap untuk menghadapi meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang berakibat kerugian negara/daerah terutama di Jawa Tengah. Untuk itu, Inspektorat daerah perlu mempersiapkan auditornya terutama dalam rangka pemeriksaan investigatif, penilaian kerugian negara, serta pemberian keterangan ahli. Dalam kemitraan ini, diharapkan BPK dan Inspektorat bisa bekerja sama seperti dalam peningkatan kompetensi SDM, penyempurnaan metodologi, serta peningkatan hubungan dengan *stakeholder*.